

**LAPORAN TRIWULAN III
CAPAIAN PENETAPAN KINERJA (P K)
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014**

I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji RKT (Rencana Kinerja Tahunan) yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima tugas dengan dengan pihak yang memberi tugas. Penetapan Kinerja menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Kesulitan dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah menjadi salah satu faktor utama yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Ukuran keberhasilan instansi Pemerintah selama ini masih berorientasi pada output dan belum berorientasi pada outcome.

Perencanaan Kinerja adalah suatu proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Penetapan Kinerja yang selanjutnya disebut PK adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pemimpin instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Penetapan Kinerja (PK) merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja sesuai yang direncanakan. Penetapan Kinerja harus memuat IKU dan pagu anggaran yang tersedia. Penetapan Kinerja harus menggambarkan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan yang meliputi: (1) Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Kementerian Pertanian; (2) Pengembangan Kerjasama Luar Negeri untuk Bidang Pangan dan Pertanian dalam Kerangka Bilateral, Regional, dan Multilateral; (3) Pengembangan Perstatistikan dan Sistem Informasi Pertanian; (4) Pengelolaan Keuangan, Perlengkapan, dan Kearsipan Kementerian Pertanian; (5) Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian; (6) Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Informasi Publik; (7) Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtangaan dan Pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian, (8) Perizinan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Pertanian.

Sejalan dengan reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang dimulai tahun 2010 setiap Kementerian/Lembaga harus merestrukturisasi program dan kegiatan sebagai wujud pelaksanaan amanat pengembangan e-performance, serta mengacu pada arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga setiap unit kerja harus memiliki indikator kinerja, merencanakan program/kegiatan, melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerjanya sendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Evaluasi Sakip. Kementerian Pertanian Tahun 2013, juga men insyaratkan bahwa Penetapan Kinerja harus di monitor/evaluasi secara berkala (Triwulan).

Tujuan

Guna melihat sejauh mana tingkat capaian kinerja dibandingkan dengan target yang tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) sampai dengan Triwulan III tahun 2014 yang dilaksanakan oleh lingkup Sekretariat Jenderal kementerian Petanian.

II. Hasil Laporan Evaluasi Triwulan III Penetapan Kinerja (PK) Lingkup Sekretariat Jenderal.

II.1. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat

Berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Biro Umum dan Hubungan Masyarakat Tahun 2014, sesuai dengan Sasaran Strategis yaitu Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akuntabel dan transparan, serta terlaksananya pemasyarakatan program dan komunikasi pembangunan pertanian dan Indikator Kinerja adalah :

(1) Meningkatnya pemberitaan positif . Biro Umum dan Hubungan Masyarakat telah menetapkan targetnya 7% .

Dari hasil laporan Triwulan III yang baru terelisasi 6 %., Yaitu dari Analisa berita selama Januari- September 2014 pada media cetak antara lain: terdapat sebanyak 5.957 Berita dari media cetak terdiri atas 2.144 berita positif (35,99%); 1.074 berita negatif (18,03%) dan 2.636 berita netral (44,25%). Permasalahannya pada dampak perubahan iklim yang mengakibatkan produksi pangan menurun/gagal panen, jadi mengakibatkan banyaknya pemberitaan negatif, di media cetak. Telah dilakukan tindak lanjut advertorial di media cetak, press release, dan press conference, serta sosialisasi kegiatan –kegiatan yang menciptakan citra positif di masyarakat serta melakukan kerjasama yang baik secara internal maupun lintas unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

(2) Layanan sarana dan prasarana kantor pusat yang terpenuhi dengan menetapkan targetnya 60 %

Dari hasil laporan Triwulan III Pada Indikator (2), baru terelisasi 60 %, yaitu sudah terpenuhi sarana dan prasarana dengan standar minimum. Permasalahannya pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggaran yang masih kurang dan Tindak lanjutnya dengan melakukan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM.

II.2. Biro Organisasi dan Kepegawaian

Sasaran Strategis dari Biro Organisasi dan Kepegawaian, Meningkatnya kualitas penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengelolaan kepegawaian yang tertib serta tercapainya reformasi birokrasi dengan 3 (tiga) Indikator yaitu :

- (1). Indeks Penerapan Nilai –nilai Budaya kerja dengan target 72. Hasil laporan Triwulan III yang baru terealisasi 90 %, Karena telah dilakukan survey dan penyebaran kuesioner IPNBK kepada seluruh responden yaitu pegawai lingkup Setjen Kementan dan sudah mulai disusun dan direncanakan akan selesai pada bulan Oktober 2014. Untuk hasil IPNBK Setjen Kementan akan di Ekspose pada bulan November 2014.
- (2). Dokumen di Bidang Organisasi, Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi yang dapat dilaksanakan dan target penyelesaian 80%, dari hasil laporan Triwulan III yang baru terealisasi 50%, Permasalahannya (a).Karena masih terdapat kecenderungan dari banyak pegawai untuk mendapatkan kelas jabatan yang tinggi, sementara pekerjaan real yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Tindak lanjutnya telah disampaikan kepada seluruh pengelola kepegawaian agar tetap menggunakan mekanisme perubahan jabatan sesuai dengan aturan yang ada. (b) Menindaklanjuti hasil Reviu PMPRB , Kementerian Pertanian Tahun 2014 terdapat Perubahan data penilaian, sehingga perlu adanya penambahan kelengkapan evidence dan Tindak lanjutnya telah disampaikan kepada seluruh Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian agar segera melengkapi Evidence yang dibutuhkan dalam PMPRB Tahun 2014.
- (3). Kualitas layanan kepegawaian tepat waktu dan target selesainya 80%, Pada Laporan triwulan III sudah terealisasi 98,4%, dikarenakan Kegiatan Pelayanan Satu Atap 1 sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 telah diproses Surat Keputusan sebanyak 1.996 buah dan telah diajukan ke BKN sebanyak 1.956 buah untuk diproses lebih lanjut. Untuk pelayanan satu atap 11 akan dilaksanakan pada bulan Agustus, telah memproses Surat Keputusan sebanyak 486 ke BKN untuk diproses lebih lanjut.

II.3. Biro Keuangan dan Perlengkapan

Dari Sasaran Strategis Biro Keuangan dan Perlengkapan, yaitu Tentang Pengelolaan keuangan dan Perlengkapan secara Akuntabel dan Transparan serta Pengelolaan kearsipan secara tertib, dengan 2 Indikator antara lain:

- (1). Laporan Keuangan Kementerian Pertanian lengkap dan tepat waktu dengan target 95% hasil laporan evaluasi Triwulan III yang sudah terealisasi 80% dengan telah dilaksanakan ; a) penyusunan laporan keuangan BA.018 dan BA.999.07 serta BA 999.08 Kementerian Pertanian pada semester 1 tahun 2014 ; b) Sudah dilakukan Rekonsiliasi data SAI dan SAU untuk periode Juli dan Agustus tahun 2013 ; c) Menindak lanjuti temuan BPK atas laporan keuangan Kementerian Pertanian tahun 2013.
- (2). Arsip Dinamis yang dapat disediakan sebagai alat bukti yang sah, dan target penyelesaiannya 95% dari hasil laporan Triwulan III baru terealisasi 70%. Karena Kementerian Pertanian telah menerbitkan Pedoman Klasifikasi Arsip, dari tahun 1956 sampai 1990-an, agar pengelolaan arsip Inaktif lingkup Kementerian pertanian dapat lebih tertib dan lebih aman dan dalam pelaksanaannya akan selalu dilakukan input arsip inaktif. Juga telah dilaksanakan Bimbingan Teknis kearsipan dan Bimbingan Teknis pemberkasan dan penyusutan.

II.4. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Sasaran Strategis Pusat Data dan Informasi, yaitu Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas data Pertanian, dengan 2 Indikator

- (1) Akses Pengguna terhadap Layanan data dan Informasi pertanian (google analytics) dengan target selama 1 Tahun 750.000 Hits ,dan di Targetkan pada Triwulan III 300.000 Hits, User mengakses web Kementan sebanyak 840.920 Hits ini melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Triwulan III yaitu 300.000 Hits, hal ini karena adanya seleksi penerimaan pegawai di Kementerian Pertanian Tahun 2014.

- (a) Data yang selalu di update di dalam database antara lain BDSP (Basis Data Statistik Pertanian) dan EXIM(Expor Import)
 - (b) Publikasi statistik yang diterbitkan secara rutin (outlook sub sector/data yang dianalisis, newsletter/berita aktual)
 - (c) Layanan informasi Teknologi Kementerian Pertanian berbasis Informasi Teknologi..
- (2) Kepuasan Pengguna layanan Pusdatin dengan target 70%. Hasil laporan Triwulan III yang terealisasi baru 20%, Telah tersusunnya Pedoman Survei, telah dilaksanakan survey di Eselon I di lingkup Kementan 70% Untuk mengukur kepuasan pengguna layanan Pusdatin baik di Pusat maupun Daerah terbagi menjadi 2 bagian yaitu: (1) Layanan Data , (2) Layanan Sistem Informasi. Pada layanan data dibagi menjadi 3 Indikator antara lain (a) Kualitas data (b) Pelayanan data dan (c) Produk Publikasi. Variabel yang akan diukur merupakan produk-produk pusdatin yang ada pada kegiatan antara lain di 01 yaitu : Penyusunan, Pengkajian dan pada kegiatan 02 yaitu Pengembangan Data, Pembinaan, informasi Pemanfaatan dan Analisis Data dan informasi. Permasalahannya untuk bisa melihat Capaian Indikator Kinerja baru bisa terlihat pada Triwulan IV setelah dilakukan analisis survei Kepuasan Pengguna Layanan Pusdatin dan akan ditindak lanjuti dengan dilaksanakan survei lapang di Dinas dan BPTP di 11 Provinsi yaitu; Jabar, Banten, Jatim, Jateng, Bali, Sumut, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulsel, Sulut..

II.5 Pusat Kerja Sama Luar Negeri (PKLN).

Sasaran Strategis dari Pusat Kerja Sama Luar Negeri adalah Meningkatnya Intensitas dan Kualitas kerjasama luar negeri di bidang Pertanian melalui forum Bilateral, Regioal dan Mutiliteral, dan Indikator Jumlah kegiatan kerjasama luar negeri yang di tindak lanjuti dengan target 75. Pada Triwulan III sudah teraealisasi baru 50, Permasalahannya,

telah dikoordinasikan dengan instansi lain dengan mengupayakan percepatan kegiatan termasuk kegiatan kontraktual dan juga pada proses Pertanggung jawaban Keuangan yang sering terkendala karena proses administrasi.

Telah ditindaklanjuti dengan revisi terhadap kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan melakukan Sosialisasi dan Workshop laporan keuangan tingkat satker.

II.6 Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Sasaran Strategis dari Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan perizinan Pertanian, dengan Meningkatnya Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan 2 Indikator yaitu :

- (1) Surat izin dan rekomendasi bidang pertanian yang diterbitkan tepat waktu dan Indikator ini merupakan Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 3200 dari laporan Triwulan III baru terealisasi 430.(81,8%)
.yaitu telah diterbitkan surat izin pupuk sebanyak 35 untuk surat izin pestisida telah di terbitkan 275 surat , Surat izin pemasukan/pengeluaran benih tanaman telah diterbitkan 99 surat dan juga di terbitkan 21 rekomendasi bidang Peternakan.
- (2). Pemberian hak perlindungan varietas tanaman, Indikator ini juga merupakan Kinerja Utama Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 50. Pada laporan Triwulan III baru terealisasi 15 (54 %) , Telah di terbitkan 12 sertifikat dari permohonan tahun 2013 pada Bulan Juli 2014, yaitu 1 untuk Tanaman Pangan, 10 untuk Tanaman Sayuran dan 1 untuk Tanaman Buah. Permasalahannya yaitu adanya permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat standar teknis dan ada juga permohonan yang ditarik kembali dan karena permohonan hak PVT masih dalam proses administrasi, pengumuman dan pemeriksaan substantif. Telah di tindaklanjuti dengan meningkatkan sosialisasi persyaratan teknis dan telah di proses sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

II.7 Biro Perencanaan

Sasaran Strategis dari Biro Perencanaan, dengan membuat Dokumen Perencanaan, Kebijakan, Anggaran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan Kementerian Pertanian yang berkualitas baik. Dengan 2 Indikator Yaitu:

1. Dokumen Perencanaan yang dapat dilaksanakan dengan Target 63%. Pada laporan Triwulan III baru terealisasi 17,28% dan kemajuan pelaksanaannya 52,05%.
 - (1). Telah diselesaikan Dokumen diantaranya: Laporan SIPP, Trilateral Meeting 2015, Rakernas 2014, SBK 2015, Nota Keuangan dan RAPBN 2015 Lingkup Kementan, Sosialisasi Pedoman Bansos 2014, RAPBN Pagu Alokasi Anggaran Lingkup Kementan Tahun 2015, Rapat Regional DAK 2014, Penyusunan Kesesuaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam Juknis DAK Bidang Pertanian 2014 dan Koordinasi, Pembinaan DAK 2014, Penyusunan dan Validasi data Teknis DAK Bidang Pertanian 2015, Lakip 2013, Workshop Aplikasi Monev 2014 dan Pemantauan dan Evaluasi DAK Bidang Pertanian Tahun 2013.
 - (2). Dokumen lainnya menghasilkan laporan secara berkala (Triwulanan dan Bulanan dan Laporan finalnya di akhir tahun.
Permasalahannya Panduan pencapaian realisasi fisik belum sepenuhnya digunakan oleh Biro/Pusat. Tindak Lanjutnya Biro Perencanaan akan mengkoordinasikan kembali dengan Biro/Pusat terkait dengan Panduan Pengukuran realisasi Fisik Lingkup Setjen dalam waktu yang tidak terlalu lama.
2. Nilai SAKIP Sekretariat Jenderal dengan Target 75%. Pada Laporan Triwulan III belum terealisasi karena Masih menunggu hasil penilaian Itjen

II.8 Biro Hukum dan Informasi Publik.

Sasaran Strategis dari Biro Hukum dan Informasi Publik, yaitu Meningkatnya ketersediaan peraturan perundang-undangan, pelayanan bantuan hukum, serta informasi publik di bidang pertanian dengan 2 Indikator yaitu :

- (1). Peraturan Perundang-undangan bidang pertanian yang dapat diterbitkan (prolegtan) dengan target 30, pada triwulan III baru terealisasi 24 (27,54%) yaitu masih perlu disempurnakan rumusan substansi terkait dan perlu di sinkronisasikan dengan Permentan yang terkait, Permasalahannya karena belum ada draf maka kesulitan mendapatkan materi muatan/substansi teknis dari Direktorat teknis dan Tindak lanjutnya, (a) Masih dalam pembahasan (b) Dilakukan harmonisasi dengan Unit kerja Eselon 1 Lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi Terkait
- .(2). Indeks layanan informasi publik bidang pertanian (NILAI IKM). Dengan target 81, pada triwulan III. Penilaian Masih dalam Proses dan Tindak lanjut penilaiannya dilakukan pada akhir tahun.